



# Laporan Kinerja

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

# 2023



## KATA PENGANTAR

**A**ssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi dalam Laporan Kinerja disajikan secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan / kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis (indikator kinerja utama) yang diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Dua sasaran strategis atau 66,67% mencapai keberhasilan dengan kategori **Memuaskan**, dan 1 (satu) sasaran strategis 33,33% mencapai keberhasilan dengan kategori **Sangat Baik**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan selalu mengupayakan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) untuk peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2024  
Kepala DPM & PTSP  
Provinsi Sumatera Barat

**ADIB ALFIKRI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197304131997031001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Pemerintah melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Dari dua indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian pada kedua indikator kinerja utama menunjukkan capaian kinerja pada kategori **Memuaskan**, dan satu indikator kinerja penunjang menunjukkan capaian kinerja pada kategori **Sangat Baik**. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dimana pencapaiannya mencapai ( kondisi triwulan 3 ) sebesar **Rp. 7.211.987.280.000,-** pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pencapaian dengan Nilai Interval Konversi IKM sebesar **96,48** dengan Nilai Interval IKM sebesar **3,81** serta sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat, dengan pencapaian **BB** dengan nilai **79,63**.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ke depan yaitu ;

**Pertama**, Sasaran pertama IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat capaian kinerjanya **Memuaskan**. Namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Dalam penyusunan peta potensi peluang investasi harus lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di semua wilayah Sumatera Barat.

**Kedua**, pembinaan terhadap perusahaan PMA dan PMDN di Sumatera Barat perlu lebih ditingkatkan, sehingga kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terus meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan

serta pembinaan terhadap proyek investasi serta para pelaku usaha terutama Usaha Kecil Mikro yang menjadi pendorong Bergeraknya perekonomian Sumatera Barat sehingga nilai realisasi investasi di Sumatera Barat lebih meningkat.

**Ketiga,** meningkatkan sosialisasi terkait perubahan kebijakan secara terpadu terutama kepada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil ( UKM ) yang menjadi pendorong giatnya perekonomian secara keseluruhan sejak kejadian pandemi covid 19, sehingga pelaku usaha Usaha Mikro Kecil memiliki Nomor Induk Berusaha yang membantu peningkatan kelas usaha serta permodalannya.

**Keempat,** perlu terus meningkatkan koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota dan Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maupun juga dengan Dinas Teknis, terkait pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ihtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
<b>BAB. I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	3
1.4. Gambaran Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat .....	4
1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan .....	4
1.4.2. Struktur Organisasi .....	8
1.4.3. Sumber Daya Manusia .....	9
1.4.4. Anggaran .....	13
1.4.5. Inventarisasi Aset .....	16
1.4.6. Sarana dan Prasarana .....	17
1.5. Isu – Isu Strategis .....	18
1.6. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB. II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>23</b>
2.1. Rencana Strategis .....	23
2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Sumatera Barat .....	23
2.1.2. Tujuan .....	26
2.1.3. Sasaran .....	26
2.1.4. Strategi .....	28
2.1.5. Kebijakan .....	29
2.1.6. Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	30
2.2. Penetapan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat .....	31
2.2.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	32

BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	35
3.1.	Metodologi Pengukuran Kinerja .....	37
3.3.	Hasil Pengukuran Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat .....	39
3.4.	Capaian Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat .	41
BAB. IV	PENUTUP .....	89
LAMPIRAN		
1.	Perjanjian Kinerja	
2.	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
3.	Rencana Aksi dan Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
4.	Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022	
5.	Cascading DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	
6.	Rekapitulasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	10
Tabel 1.2.	Komposisi Golongan Pegawai DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	11
Tabel 1.3.	Daftar Pejabat Fungsional DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	13
Tabel 1.4.	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	14
Tabel 1.5.	Daftar Aset DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	16
Tabel 1.6.	Daftar Kendaraan Dinas DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	18
Tabel 2.1.	Hubungan Hirarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	27
Tabel 2.2.	Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	30
Tabel 2.3.	Penetapan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	32
Tabel 2.4.	Anggaran DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 2.5.	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 3.1.	Kategori Keberhasilan Indikator Kinerja	38
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	40
Tabel 3.3.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	42
Tabel 3.4.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Strategis 1.1	44
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi, Capaian Tahun 2020 – 2021 dan Target 2022	47
Tabel 3.6.	Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2022	48
Tabel 3.7.	Realisasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 2022	45
Tabel 3.8.	Realisasi PMA Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota Tahun 2022	51
Tabel 3.9.	Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Tahun 2022	52
Tabel 3.10.	Realisasi PMDN Berdasarkan Lokasi Tahun 2022	53
Tabel 3.11.	Posisi Sumatera Barat secara Nasional terkait realisasi PMDN tahun 2022	55

Tabel 3.12.	Posisi Sumatera Barat secara Nasional terkait realisasi PMA tahun 2022	56
Tabel 3.13.	Posisi Sumatera Barat secara Regional terkait realisasi PMDN tahun 2022	58
Tabel 3.14.	Posisi Sumatera Barat secara Regional terkait realisasi PMA tahun 2022	58
Tabel 3.15.	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat Tahun 2022	62
Tabel 3.16.	Kelas Interval Survei IKM	66
Tabel 3.17.	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2	67
Tabel 3.18.	Nilai Indeks Unsur Pelayanan Yang Diobservasi Tahun 2022	69
Tabel 3.19.	Perbandingan Realisasi, Capaian Tahun 2021 – 2022 dan target 2023 Indikator Kinerja	70
Tabel 3.20.	Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Januari s.d Desember 2022	71
Tabel 3.21.	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75
Tabel 3.22.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	76
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi, Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021 – 2022 dan target 2023	77
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 – 2022 dan Target 2023	78
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Tahun	80
Tabel 3.26	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	83
Tabel 3.27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	84
Tabel 3.28	Daftar Inovasi Daerah Tahun 2022	86

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Grafik 3.1 Lima Besar Negara yang Melakukan Investasi PMA	50
Grafik 3.2 Lima Besar Investasi PMDN berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota	54

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	Halaman 8
------------	--	--------------

# BAB I PENDAHULUAN

*Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun Anggaran 2023.*

## 1.1. LATAR BELAKANG

**A**kuntabilitas kinerja menjadi salah satu azas umum penyelenggaraan Negara yang menentukan bahwa setiap dari kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara negara ditingkat Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan negara kepada masyarakat / rakyat dengan menyusun Laporan kinerja. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 yang menyatakan bahwa Gubernur

menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat atas pencapaian Tujuan dan Sasaran yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas apa yang telah dan seharusnya dicapai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang.

### ***1.3. DASAR HUKUM***

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### ***1.3. GAMBARAN UMUM DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT***

#### ***1.4.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI & KEWENANGAN***

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177 ) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di urusan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan indikator Jumlah Masalah Pelayanan Terpadu terkait Perizinan dan Non Perizinan yang Terfasilitasi dan Termediasi serta Jumlah Permasalahan Investasi Yang Difasilitasi Penyelesaiannya.
2. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu.
3. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP.
4. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDFPM) dengan indikator jumlah event yang diikuti terkait promosi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat.

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan indikator Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan.
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, dengan indikator Jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:

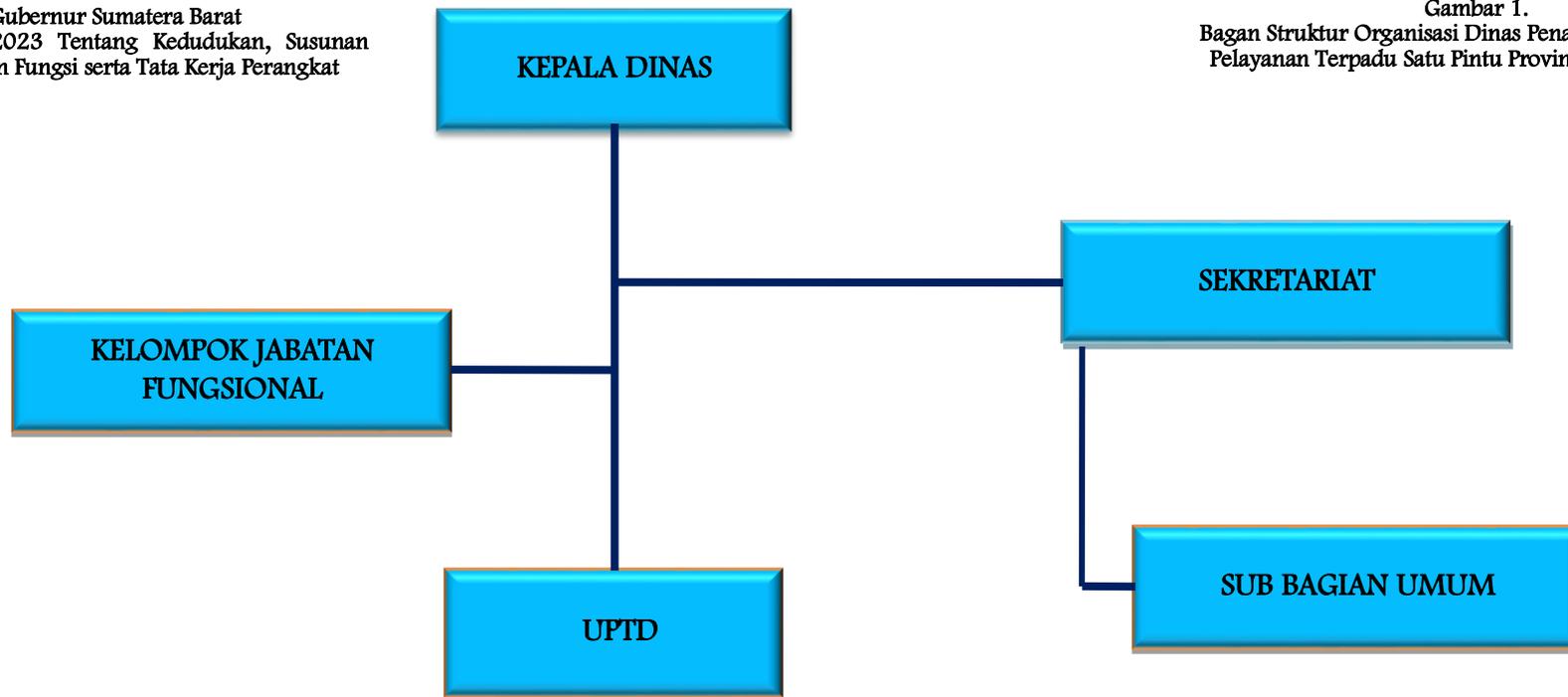
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  - Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. UPTD.

#### ***1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI***

Pada laporan kinerja ini, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang menjelaskan koordinasi dalam hal pendelegasian perintah dari atasan kebawahan sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut:

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah



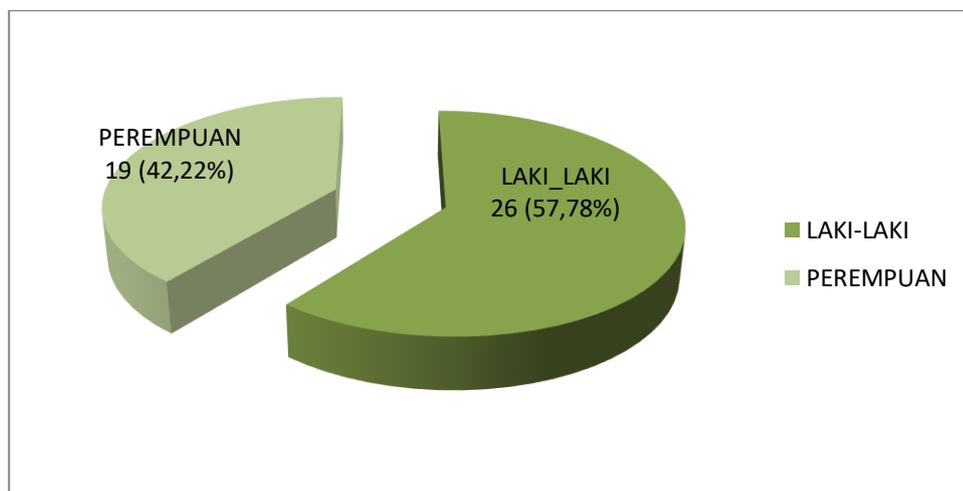
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

### 1.4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi yang berjumlah 45 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang (57,78%) laki-laki dan 19 orang (42,22%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

**Grafik 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**



*Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023*

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

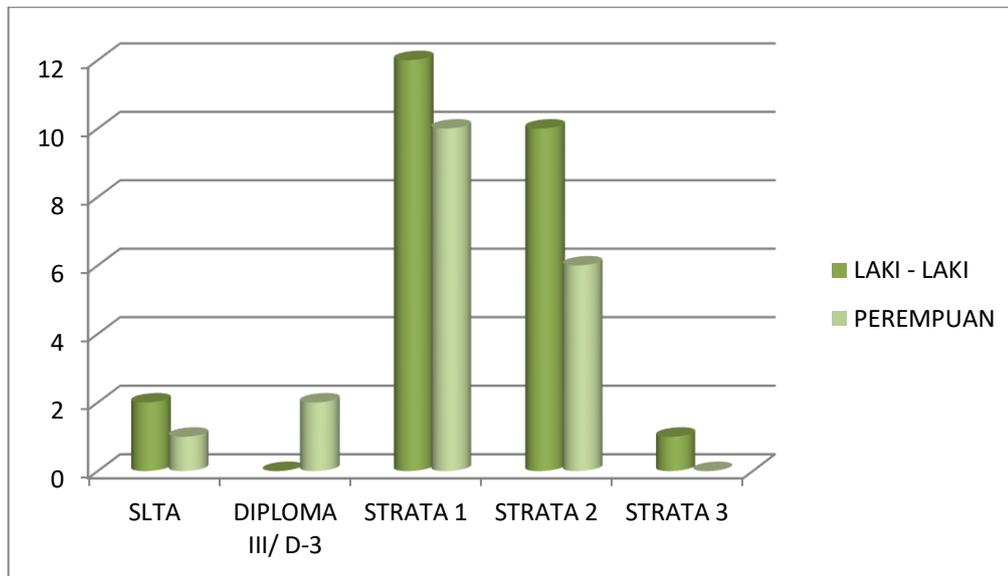
Tabel 1.1.  
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	~	~	~	0%
2	SLTA	2	1	3	6,67%
3	DIPLOMA III/ D-3	~	2	2	4,44%
4	STRATA 1	12	10	22	48,89%
5	STRATA 2	11	6	17	37,78%
6	STRATA 3	1	~	1	2,22%
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subag Umum DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 93,33% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 42,76% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

**Grafik 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**



*Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023*

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2.**  
**Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**

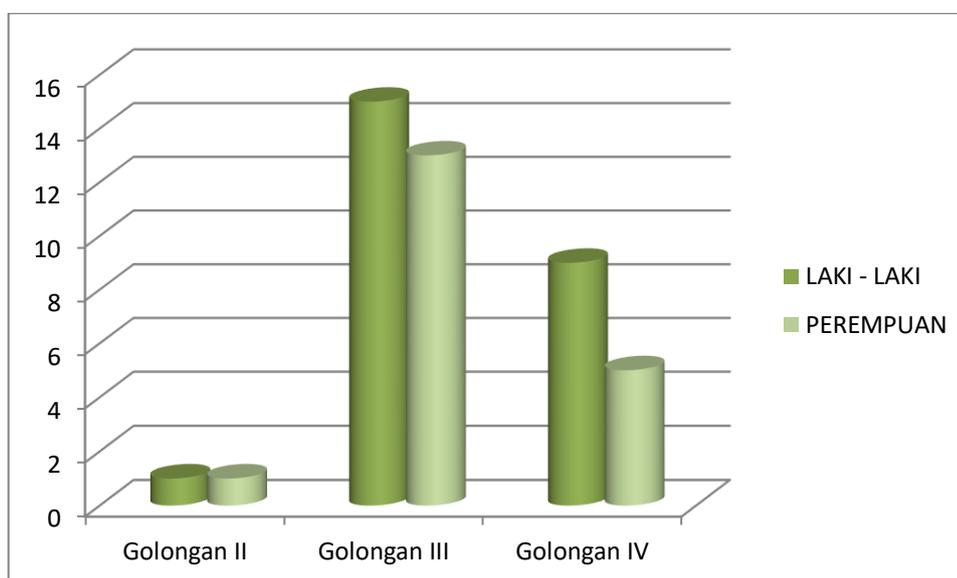
NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	~	~	0	0%
2	Golongan II	1	1	2	4,45%
3	Golongan III	15	13	28	62,22%
4	Golongan IV	10	5	15	33,33%
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023*

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 95,45% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang

berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepegangannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

**Grafik 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**



*Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023*

#### **1.4.4. ANGGARAN**

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 didukung oleh Dana PAD Provinsi Sumatera Barat dan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan total anggaran sebesar Rp. 15.175.695.922,- yang terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, dengan rincian Belanja sebagai berikut:

Belanja Daerah	:	Rp. 15.175.695.922,-
a. <b>Belanja Operasi</b>	:	<b>Rp. 15.066.827.012,-</b>
Belanja Pegawai	:	Rp. 7.029.388.783,-
Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 8.037.438.229,-
b. <b>Belanja Modal</b>	:	<b>Rp. 109.868.910,-</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	Rp. 109.868.910,-

Sumber : DPPA Perubahan DPMPTSP Tahun 2023

Rincian Anggaran Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2023**

NO. URUT	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	%
1	2	3	4
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>15.176.695.922</b>	<b>100,00</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.876.936.725</b>	<b>65,08</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>104.230.030</b>	<b>0,69</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.302.000	0,48
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.928.030	0,21
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.056.222.613</b>	<b>46,49</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.874.188.783	45,29
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.416.000	1,04
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.617.830	0,16
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.400.000</b>	<b>0,12</b>

6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.400.000	0,12
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>97.646.190</b>	<b>0,64</b>
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.736.940	0,30
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.318.000	0,40
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>733.688.309</b>	<b>4,83</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.604.100	0,17
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.602.990	0,68
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.103.296	0,13
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.080.000	0,11
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	750.391.751	4,94
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.080.000	0,11
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.996.310	0,99
<b>F</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.265.920</b>	<b>0,05</b>
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.265.920	0,05
<b>G</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.052.974.085</b>	<b>6,94</b>
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.654.500	0,16
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.100.000	1,00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	877.219.585	5,78
<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>382.439.940</b>	<b>2,52</b>
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.967.500	0,30
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.827.000	1,18
22	Pemeliharaan Mebel	7.000.000	0,05

23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.235.440	0,28
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.410.000	0,71
02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.229.794.450</b>	<b>8,10</b>
B	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	<b>1.229.794.450</b>	<b>8,10</b>
25	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	72.260.900	0,48
26	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1.157.533.550	7,63
03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>471.900.650</b>	<b>3,11</b>
A	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>471.900.650</b>	<b>3,11</b>
27	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	65.655.000	0,43
28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	406.245.650	2,68
04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>2.408.684.900</b>	<b>15,87</b>
A	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>1.467.706.650</b>	<b>9,67</b>
29	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.408.684.900	15,87
30	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	97.498.000	0,64
31	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	129.062.350	0,85
05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.151.176.997</b>	<b>7,59</b>
A	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>1.151.176.997</b>	<b>7,59</b>
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9.110.000	0,06
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	721.815.700	4,76
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	420.251.297	2,77
06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>38.202.200</b>	<b>0,25</b>

A	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	38.202.200	0,25
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	38.202.200	0,25
<b>JUMLAH</b>		<b>15.176.695.922</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DPPA Perubahan DPMPTSP Tahun 2023

#### **1.4.5. INVENTARISASI ASET**

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.241.299.633,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.604.892.769,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 636.406.864,-. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
I.	<b>ASET TETAP</b>	
1	Golongan Tanah - Tanah	~
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi - Alat Kedokteran	2 unit 11 unit 13 unit 1 unit 286 unit 9 unit 2 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	~
4	Golongan Aset Tetap lainnya - Buku Perpustakaan - Barang Bercorak Kebudayaan	15 Buah 3 Unit
II.	<b>ASET LAINNYA</b>	
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	~

*Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023*

#### **1.4.6. SARANA DAN PRASARANA**

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas dan sampai saat ini menempati gedung milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan status pinjam pakai.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, ruangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ruangan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, ruangan Bidang Promosi Penanaman Modal dan ruangan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan rapat, ruang tunggu pelayanan, Mushala dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

**Tabel 1.6**  
**Daftar Kendaraan Dinas**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**

NO	JENIS KENDARAAN	MERK	DIPERGUNAKAN UNTUK	TAHUN PEMBUATAN
1	2	3	4	5
1.	Mobil	Honda Accord	Operasional	2007
2.	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional	2002
3.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
4.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2012
5.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2018
6.	Mobil	Mitsubishi Triton	Operasional	2016
7.	Mobil	Mitsubishi Pajero	Operasional	2017
8.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
9.	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional	2018
10.	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional	2012
11.	Sepeda Motor	Honda	Operasional	2011

*Sumber : Laporan Barang Milik Daerah DPM & PTSP Tahun 2023*

### 1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026.

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim dan Minat Investasi;
2. Peningkatan Realisasi Investasi dengan Mempedomani Rencana Investasi;
3. Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendukung Investasi;
4. Meminimalisir Konflik Sosial antara Masyarakat dengan Calon Investor;
5. Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan ( Tanah Ulayat ) antara Masyarakat dengan Calon Investor;
6. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terkait dengan Perubahan Regulasi Perizinan;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung dan Ruang Pelayanan Perizinan DPM & PTSP; dan
8. Mengoptimalkan Proses Penerbitan Izin sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan.
9. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Keefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga dapat risiko cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
10. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
11. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.

12. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi. Isu ini perlu diperhatikan agar daerah memiliki *positioning* yang lebih jelas berkaitan dengan potensi bisnis dan prioritas pengembangan dapat dilakukan secara lebih efektif oleh pemerintah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

### ***1.6. SISTIMATIKA PENULISAN***

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.

BAB II : Perencanaan Kinerja, Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :

- a. Metodologi Pengukuran Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud.

- d. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan dan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

*Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang berisi rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran DPM & PTSP, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja 2023.*

---

---

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

#### 2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Sumatera Barat

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, adalah :

**“ TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN “**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2021-2026, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

**Masyarakat Madani**, Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat Madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

**Sumatera Barat Yang Unggul**, Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya Pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta Pariwisata di Sumatera Barat.

**Pembangunan Berkelanjutan**, Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka

sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

**Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Misi 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Misi 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. **Misi 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;**
5. Misi 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. **Misi 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

### ***2.1.2. TUJUAN***

Tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdapat pada tujuan dari misi ke 4 dan misi 7 adalah “**Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**

berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah” dan “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Professional”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” dengan Indikator Kinerja Tujuan “Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dan “Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani“ dengan Indikator Kinerja Tujuan “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”.

### **2.1.3. SASARAN**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Sasaran Strategis pertama : **“Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat“;**  
Dengan indikator kinerja : **“Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN“;**
2. Sasaran Strategis kedua : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu“;**  
Dengan indikator kinerja : **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)“;**
3. Sasaran Strategis ketiga : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi“;**  
Dengan indikator kinerja : **“Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD“;**

Hubungan hirarki antara visi, misi, tujuan dengan indikator kinerja serta sasaran strategis organisasi perangkat daerah beserta indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1  
Hubungan Hirarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	2	3	4	5
Misi 4 : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”.				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 2 : “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”.				
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Sumber : Renstra DPMPITSP Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026

Pencapaian tujuan secara umum pelaksanaan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat, banyak melibatkan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah dalam meningkatkan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah.

Secara khusus berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

#### 2.1.4. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program – program indikatif untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat secara berkelanjutan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, telah menentukan strategi untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi, yaitu :
  - a. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
  - b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Sumatera Barat;
  - c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi;
  - d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal;
  - e. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM;
2. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan, yaitu ;
  - a. Membuat Regulasi Teknis Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan izin-izin Strategis;
  - b. Menerapkan Pola Online System Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan;
  - c. Meningkatkan Kapasitas Aparatur PTSP;
  - d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.

### ***2.1.5. KEBIJAKAN***

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, yaitu:
  - a. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi dan peluang investasi dan pengolahan informasi peluang investasi;
  - b. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah;
  - c. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat melalui berbagai media.
  - d. Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
  - e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap PMA & PMDN.
2. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik, yaitu :
  - a. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel;
  - b. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah terkait;
  - d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.

### ***2.1.6. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN***

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat. Adapun program – program yang dilaksanakan untuk mendukung masing – masing sasaran tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH PROGRAM	PROGRAM
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	4 program	Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Program	Program Pelayanan Penanaman Modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1 Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sumber : DPPA DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

## **2.2. PENETAPAN KINERJA DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2023, IKU dan APBD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah menetapkan Penetapan Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Penetapan Kinerja DPM & PTSP  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Investasi</b>	1. <b>Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi</b>	8 %
1.1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA ( ribu US \$ ) PMDN ( juta Rp. ) Total ( juta Rp. )	70.000 4.594.670 5.602.670
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75/ 3,41
2.	<b>Meningkatnya Kinerja Organisasi</b>	2. <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</b>	A ( 80,25 )
2.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A ( 80,25 )

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023*

### 3.2.1. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 15.176.695.922,- yang digunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Anggaran DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	2	3	4
	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp. 15.176.695.922,-	100 %
I.	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp. 15.066.827.012,-	99,28 %
1.	Belanja Pegawai	Rp. 7.029.388.783,-	46,65 %
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.037.438.229,-	53,35 %
II.	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp. 109.868.910,-	0,72 %
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 109.868.910,-	0,72 %
	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp. 15.176.695.922,-	100 %

Sumber : DPPA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Alokasi anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan untuk membiayai program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis  
Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	2.891.074.297,-	19,05 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.408.684.900,-	15,87 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	9.876.936.725,- (termasuk gaji dan tunjangan ASN)	65,08 %
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>15.176.695.922,-</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber : DPPA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 15.176.695.922,- dengan persentase terbesar untuk mendukung sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi** dengan anggaran

sebesar Rp. 9.876.936.725,- atau sebesar 65,08% yang didalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan ASN, kemudian untuk sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat** dengan anggaran sebesar Rp. 2.891.074.297,- atau sebesar 19,05% serta untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan anggaran sebesar Rp. 2.891.074.297,- atau sebesar 15,87% dari total anggaran belanja operasi dan belanja modal, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

*Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang berisi rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran DPM & PTSP, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja 2023.*

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

#### 2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Sumatera Barat

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, adalah :

**“ TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN “**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2021-2026, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

**Masyarakat Madani**, Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat Madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

**Sumatera Barat Yang Unggul**, Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya Pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta Pariwisata di Sumatera Barat.

**Pembangunan Berkelanjutan**, Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka

sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

**Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Misi 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Misi 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. **Misi 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;**
5. Misi 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. **Misi 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

### ***2.1.2. TUJUAN***

Tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdapat pada tujuan dari misi ke 4 dan misi 7 adalah “**Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**

berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah” dan “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Professional”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” dengan Indikator Kinerja Tujuan “Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dan “Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani“ dengan Indikator Kinerja Tujuan “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”.

### **2.1.3. SASARAN**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Sasaran Strategis pertama : **“Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat“;**  
Dengan indikator kinerja : **“Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN“;**
2. Sasaran Strategis kedua : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu“;**  
Dengan indikator kinerja : **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)“;**
3. Sasaran Strategis ketiga : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi“;**  
Dengan indikator kinerja : **“Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD“;**

Hubungan hirarki antara visi, misi, tujuan dengan indikator kinerja serta sasaran strategis organisasi perangkat daerah beserta indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1  
Hubungan Hirarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	2	3	4	5
Misi 4 : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”.				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 2 : “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”.				
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Sumber : Renstra DPMPITSP Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026

Pencapaian tujuan secara umum pelaksanaan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat, banyak melibatkan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah dalam meningkatkan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah.

Secara khusus berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

#### 2.1.4. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program – program indikatif untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat secara berkelanjutan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, telah menentukan strategi untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi, yaitu :
  - a. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
  - b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Sumatera Barat;
  - c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi;
  - d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal;
  - e. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM;
2. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan, yaitu ;
  - a. Membuat Regulasi Teknis Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan izin-izin Strategis;
  - b. Menerapkan Pola Online System Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan;
  - c. Meningkatkan Kapasitas Aparatur PTSP;
  - d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.

### ***2.1.5. KEBIJAKAN***

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, yaitu:
  - a. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi dan peluang investasi dan pengolahan informasi peluang investasi;
  - b. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah;
  - c. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat melalui berbagai media.
  - d. Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
  - e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap PMA & PMDN.
2. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik, yaitu :
  - a. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel;
  - b. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah terkait;
  - d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.

### ***2.1.6. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN***

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat. Adapun program – program yang dilaksanakan untuk mendukung masing – masing sasaran tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH PROGRAM	PROGRAM
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	4 program	Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Program	Program Pelayanan Penanaman Modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1 Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sumber : DPPA DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

## **2.2. PENETAPAN KINERJA DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2023, IKU dan APBD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah menetapkan Penetapan Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Penetapan Kinerja DPM & PTSP  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Investasi</b>	<b>1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi</b>	<b>8 %</b>
1.1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA ( ribu US \$ ) PMDN ( juta Rp. ) Total ( juta Rp. )	70.000 4.594.670 5.602.670
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75/ 3,41
2.	<b>Meningkatnya Kinerja Organisasi</b>	<b>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</b>	<b>A ( 80,25 )</b>
2.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A ( 80,25 )

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023*

### **3.2.1. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS**

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 15.176.695.922,- yang digunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Anggaran DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	2	3	4
	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp. 15.176.695.922,-	100 %
I.	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp. 15.066.827.012,-	99,28 %
1.	Belanja Pegawai	Rp. 7.029.388.783,-	46,65 %
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.037.438.229,-	53,35 %
II.	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp. 109.868.910,-	0,72 %
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 109.868.910,-	0,72 %
	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp. 15.176.695.922,-	100 %

Sumber : DPPA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Alokasi anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan untuk membiayai program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis  
Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	2.891.074.297,-	19,05 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.408.684.900,-	15,87 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	9.876.936.725,- (termasuk gaji dan tunjangan ASN)	65,08 %
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>15.176.695.922,-</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber : DPPA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 15.176.695.922,- dengan persentase terbesar untuk mendukung sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi** dengan anggaran

sebesar Rp. 9.876.936.725,- atau sebesar 65,08% yang didalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan ASN, kemudian untuk sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat** dengan anggaran sebesar Rp. 2.891.074.297,- atau sebesar 19,05% serta untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan anggaran sebesar Rp. 2.891.074.297,- atau sebesar 15,87% dari total anggaran belanja operasi dan belanja modal, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

*Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikator kerjanya yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.*

**A**kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *web-monev* adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pencapaian 2 Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

### ***3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA***

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

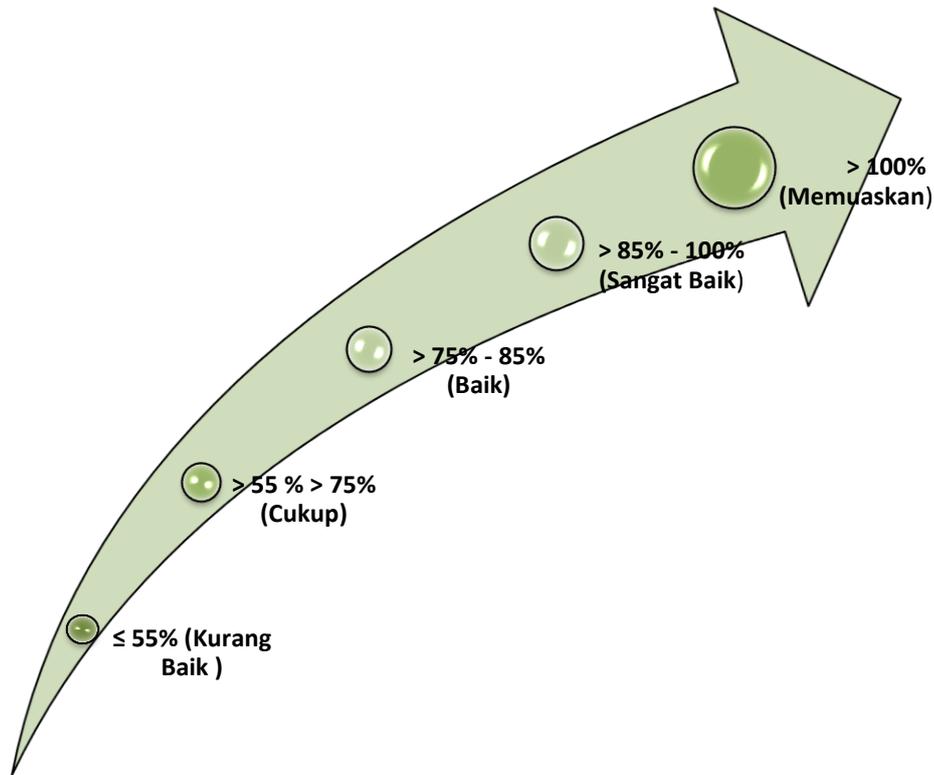
1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sejalan dengan pencapaian sasaran gubernur serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan mulai dari **Kurang Baik** dengan capaian kinerja  $\leq 55\%$  sampai **Memuaskan** dengan capaian kinerja  $> 100\%$ , sebagai berikut:



Hasil pengukuran capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan 3 (dua) indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama OPD dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja pendukung dapat dilihat dalam table 3.1., sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Keberhasilan Indikator Kinerja**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Tahun 2023**

NO	KATEGORI KEBERHASILAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Memuaskan	2 Indikator Kinerja
2.	Sangat Baik	1 Indikator Kinerja
3.	Baik	~
4.	Cukup	~
5.	Kurang Baik	~

### ***3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA***

Hasil pengukuran pencapaian capaian kinerja dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (tiga) indikator kinerja tujuan serta 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis, dimana 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
 Hasil Pengukuran Kinerja  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Sumatera Barat  
 Tahun 2023

NO	MISI/TUJUAN/	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	8%	38,65%	483 %
		1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat *)	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA ( ribu US \$ ) PMDN ( juta Rp. ) Total ( juta Rp. )	70.000,00 4.594.670,00 5.602.670,00	67.092,60 6.219.016,80 7.211.987,28	95,85% 135,35% 128,72%
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75 / 3,41	96,48 / 3,81	116,59 %/ 111,73%
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	-	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A / 80,25	BB / 79,63	99,23%
		3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A / 80,25	BB / 79,63	99,23%

\*) Oleshan Rumpum Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat 2023 Kondisi triwulan 3

Dari tabel 3.2 diketahui dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yakni 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) kinerja pendukung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, dimana 2 (dua) indikator kinerja utama sasaran strategis yaitu Nilai Realisasi PMA dan PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada level **Memuaskan** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.211.987.280.000,-** dari target sebesar **Rp. 5.602.670.000.000,-** dengan capaian kinerja sebesar **128,72%** dan sebesar **96,48/3,81** dari target **82,75/3,41** dengan capaian kinerja **116,59%/111,73%** serta 1 (satu) kinerja pendukung dengan indikator kinerja sasaran strategis berada pada level **Sangat Baik** dengan capaian kinerja sebesar **99,23%**, dimana realisasi sebesar **BB/79,63** dari target **A/80,25** untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Dibandingkan dengan hasil capaian kinerja indikator kinerja tahun 2022, hasil capaian kinerja dari indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2023 sebesar **128,72%** mengalami kenaikan sebesar **23,27% (105,46%)** dan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar **96,48** mengalami peningkatan sebesar **1,13 (95,35)** serta hasil capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023 sebesar **79,63** mengalami peningkatan sebesar **0,24 (79,39%)**.

### ***3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.***

#### ***Tujuan 1.1***

#### ***“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”***

Pencapaian tujuan ***“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”*** dengan indikator kinerja ***“Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi”*** sesuai dengan RPJMD tahun 2021 – 2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat bahwa dari realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan pada tabel 3.3, berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1**  
**“ Meningkatkan Pertumbuhan Investasi “**

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	8%	38,65%	483%	0,79%

Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan pertama yakni Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi diperoleh dari Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, kemudian dibagi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, seperti di bawah ini:

#### Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi

$$= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun } n - \text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun } n-1}{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$= \frac{7.211.987.280.000,- - 5.201.734.930.000,-}{5.201.734.930.000,-} \times 100\%$$

$$= \frac{2.010.252.350.000,-}{5.201.734.930.000,-} \times 100\%$$

$$= 38,65\%$$

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat diukur dari Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi.

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2023 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar **8%** dapat direalisasikan sebesar **38,65%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **483%** termasuk kategori keberhasilan *Memuaskan*.

Realisasi kinerja tujuan pertama dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2023, yang terealisasi sebesar **38,65%** mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar **37,85%** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dimana realisasi kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi adalah sebesar **0,79%**.

Kenaikan yang sangat signifikan dari indikator tujuan yang menjadi Indikator Kinerja Daerah ini, disebabkan banyak faktor-faktor eksternal dan internal yang menyebabkannya, salah satu yang cukup signifikan adalah pembinaan yang cukup besar terhadap UMK serta perkembangannya UMK di Sumatera Barat sejalan dengan program unggulan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat yakni mencetak 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur serta dimasukkannya LKPM dari UMK dalam penghitungan realisasi investasi .

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dari tahun 2021 sampai dengan 2023, seperti tergambar pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja**  
**Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi**  
**Tahun 2021 – 2023**

NO	URAIAN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	6 %	5,02 %	83,67 %
2.	2022	6 %	0,79 %	13,17 %
3.	2023	8 %	38,65%	483 %

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMTSP Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mencapai Tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi“, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yakni “*Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera*“ dengan indikator kinerja “*Nilai Realisasi Ivestasi PMA dan PMDN*” dan “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu*” dengan indikator kinerja “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*”.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dari kedua sasaran strategis tersebut, adalah sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 1.1.

##### “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat “

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat “ dilihat berdasarkan realisasi investasi PMA dan PMDN dan capaian kinerja indikator kinerja tersebut, seperti tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini:

**Tabel 3.5**  
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis 1.1.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN *)			
PMA ( ribu US \$ )	70.000,00	67.092,60	95,85 %
PMDN ( juta Rp )	4.594.670,00	6.219.016,80	135,35 %
Total ( Rp. )	5.602.670,00	7.211.987,28	128,72 %

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat \*) kondisi triwulan 3

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n, seperti di bawah ini:

## Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.211.987.280.000,-}{5.602.670.000.000,-} \times 100\%$$

$$= 128.72\%$$

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja **Memuaskan** sebesar **128,72%**, dimana Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN diharapkan meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN secara total ditargetkan sebesar **Rp. 5.602.670.000.000,-** ( lima trilyun enam ratus dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 7.211.987.280.000,-** ( tujuh trilyun dua ratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ).

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2023 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar **Rp. 7.211.937.280.000,-** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 2.010.202.350.000,-** dibandingkan tahun 2022, dimana nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar **Rp. 5.201.734.930.000,-**. Level dan kategori pengukuran kinerja realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2021, 2022 dan 2023, seperti tergambar pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6  
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Nilai Realisasi  
Investasi PMA dan PMDN  
Tahun 2021 – 2023  
( dalam Rp. Juta )

NO	URAIAN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	4.894.000,00	5.161.169,30	105,46%
2.	2022	5.187.640,00	5.201.734,93	100,27%
3.	2023	5.602.670,00	7.211.987,28	128,72%

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPITSP Provinsi Sumatera Barat

Nilai realisasi investasi ini terdiri dari PMA dan nilai realisasi investasi PMDN, dimana masing – masing pencapaian kinerjanya selama tahun 2023, sebagai berikut:

Realisasi Investasi PMA dari yang ditargetkan sebesar 70.000,- ribu US\$ dapat direalisasikan sebesar 67.092,60,- ribu US\$ kondisi sampai dengan triwulan 3 tahun 2023 atau sebesar 95,85% dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA di Sumatera Barat diperoleh dari membandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n, seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA} \\
 = & \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}} \times 100\% \\
 = & \frac{67.092,60}{70.000,00} \times 100\% \\
 = & 95,85\%
 \end{aligned}$$

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMA tahun 2023 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, dimana realisasi investasi PMA sebesar US\$. 67.092,60,- ribu mengalami penurunan sebesar US\$. 28.532,20 ribu dibandingkan tahun 2022, dimana nilai realisasi investasi PMA sebesar US\$. 95.624,80 ribu,-. Level dan kategori pengukuran kinerja realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA tahun 2021, 2022 dan 2023, seperti tergambar pada tabel 3.7

**Tabel 3.7**  
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA  
Tahun 2021 – 2023  
( dalam US\$. ribu )

NO	URAIAN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	135.000,00	66.949,00	49,59%
2.	2022	143.100,00	95.624,80	66,82%
3.	2023	70.000,00	67.092,60	95,85%

*Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPITSP Provinsi Sumatera Barat*

Realisasi Investasi PMDN dari yang ditargetkan sebesar Rp. 4.594.670,00 juta dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.219.964,00 juta kondisi sampai dengan triwulan 3 tahun 2023 atau sebesar 135,37% dengan tingkat capaian kinerja **Memuaskan**. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA di Sumatera Barat diperoleh dari membandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n, seperti di bawah ini:

## Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMDN

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{6.219.964.000.000,-}{4.594.670.000.000,-} \times 100\%$$

$$= 135.37\%$$

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2023 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dimana nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 6.219.964.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.325.294.000.000 dibandingkan tahun 2022, dimana nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 4.894.670.000.000,-. Level dan kategori pengukuran kinerja realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja nilai realisasi Investasi PMDN tahun 2021, 2022, dan 2023, seperti tergambar pada tabel 3.8

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Nilai Realisasi Investasi PMDN  
Tahun 2021 – 2023  
( dalam Rp. juta )

NO	URAIAN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	2.950.000,00	4.183.713,90	141,82%
2.	2022	143.100,00	95.624,80	66,82%
3.	2023	70.000,00	67.092,60	95,85%

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2023 pencapaiannya naik cukup signifikan dengan hasil capaian kinerja sebesar **128,72%** atau sebesar **Rp. 7.211.987.280.000** ( Tujuh triliun dua ratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Hal ini disebabkan oleh hal-hal :

1. Terlaksananya pengawasan / inspeksi langsung lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi riil dan laporan yang diberikan. Untuk tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan kepada 84 kegiatan usaha
2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan;
3. Adanya data – data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan;
4. Terbentuknya PIC yang bertanggungjawab dalam pencapaian dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota;
5. Dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan dalam perizinan dalam bentuk revisi RTRW dan RDTRnya;
6. Tersedianya peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor;
7. Adanya sistem verifikasi dan buru lapor kegiatan penanaman modal perusahaan (SERBU LKPM);
8. Adanya promosi berkelanjutan dan terintegrasi;
9. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur tentang Kemudahan Berusaha;
10. Terlaksananya Sosialisasi terkait Kemudahan Berusaha, Penyelesaian Permasalahan serta Pengisian Laporan Kemajuan Penanaman Modal.

Kontribusi realisasi investasi PMA tahun 2023, berdasarkan sektor usaha, dimana realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Realisasi Nilai Investasi PMA  
Berdasarkan Sektor Usaha  
Tahun 2023 \*)

NO	SEKTOR USAHA MENURUT PERKA No. 17 Tahun 2015 BKPM RI	PENANAMAN MODAL ASING ( PMA )	
		USD ( ribu )	%
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>19.192,70</b>	<b>28,61</b>
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	9.401,90	14,01
2.	Kehutanan	-	-
3.	Perikanan	-	-
4.	Pertambangan	9.790,80	14,59
<b>II.</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>21.843,10</b>	<b>32,56</b>
5.	Industri Makanan	18.104,70	26,98
6.	Industri Tekstil	-	-
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-
8.	Industri Kayu	-	-
9.	Industri Kertas dan Percetakan	-	-
10.	Industri Kimia dan Farmasi	3.668,30	5,47
11.	Industri Karet dan Plastik	70,10	0,10
12.	Industri Mineral Non Logam	-	-
13.	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	-	-
14.	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	0,00
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transporasi Lainnya	-	-
16.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan	-	-
17.	Industri Lainnya	-	-
<b>III.</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>14.908,89</b>	<b>10,52</b>
18.	Listrik, Gas dan Air	6.559,68	4,63
19.	Konstruksi	20,48	0,01
20.	Perdagangan dan Reparasi	454,86	0,32
21.	Hotel dan Restoran	139,77	0,10
22.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	6.215,81	4,38
23.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	569,36	0,40
24.	Jasa Lainnya	948,93	0,67
<b>IV.</b>	<b>UMK</b>	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>67.092,60</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.9 di atas, Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha pada tahun 2023 lima besar didominasi oleh sektor usaha industri makanan sebesar USD 18.104,70 ribu atau sebesar (26,98%), sektor usaha Listrik, Gas dan Air sebesar USD 12.051,30 ribu atau sebesar (17,96%), sektor usaha Pertambangan sebesar USD 9.790,80 ribu atau sebesar (14,59%), sektor usaha Transportasi, Gudang dan Komunikasi sebesar USD 9.782,90 atau sebesar (14,58%), sektor usaha Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Peternakan sebesar USD 9.401,90 ribu atau sebesar (14,01%).

Berdasarkan Negara, kontribusi Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini sebagai berikut:

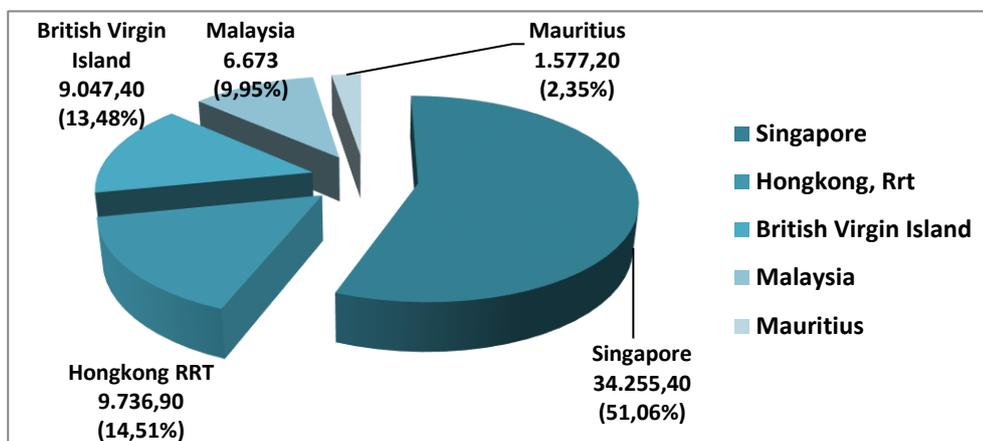
**Tabel 3.10**  
**Realisasi Nilai Investasi PMA**  
**Berdasarkan Negara**  
**Tahun 2023 \*)**

NO	NEGARA	NILAI INVESTASI (ribu USD)	%
1	2	3	4
1	Singapore	34.255,4	51,06
2	Hongkong, Rrt	9.736,9	14,51
3	British Virgin Island	9.047,4	13,48
4	Malaysia	6.673,0	9,95
5	Mauritius	1.577,2	2,35
6	R.R Tiongkok	1.336,7	1,99
7	Perancis	1.085,2	1,62
8	Selandia Baru	855,7	1,28
9	Amerika Serikat	706,6	1,05
10	Australia	404,1	0,60
11	Inggris	313,2	0,47
12	Japan	242,6	0,36
13	Seychelles	220,2	0,33
14	Belanda	212,2	0,32
15	Rusia	170,3	0,25
16	Brasil	117,5	0,18
17	Italia	53,2	0,08
18	Kanada	26,9	0,04
19	Cayman Island	22	0,03
20	India	7,8	0,01
21	Afrika Selatan	7,4	0,01

22	Spainyol	7,1	0,01
23	Panama	4,8	0,01
24	Korea Selatan	4	0,01
25	Samoa	2,2	0,00
26	Namibia	1	0,00
27	Swedia	1	0,00
28	Uruguay	1	0,00
29	Jerman	~	~
30	Irlandia	~	~
31	Ukraina	~	~
32	Belgia	~	~
<b>JUMLAH</b>		<b>67.092,60</b>	<b>100,00%</b>
<i>Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat</i>			

Dari tabel 3.10 di atas, diperoleh informasi bahwa negara yang melakukan investasi dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat selama tahun 2023, lima besar adalah negara Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 34.255,4 ribu atau sebesar (51,06%), negara Hongkong RRT dengan nilai investasi sebesar USD 9.736,9 ribu atau sebesar (14,51%), negara British Virgin Island dengan nilai investasi sebesar USD 9.047,4 ribu atau sebesar (13,48%), kemudian disusul oleh negara Malaysia dengan nilai investasi sebesar USD 6.673,0 ribu atau sebesar (9,95%), dan negara Mauritius dengan nilai investasi sebesar USD 1.577,2 ribu atau sebesar (2,35%).

Grafik 3.1 .  
Lima Besar Negara Yang Melakukan Investasi PMA  
Tahun 2023



Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan lokasi, kontribusi Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Realisasi Nilai Investasi PMA  
Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota  
Tahun 2023

NO	LOKASI	NILAI INVESTASI ( ribu USD)	%
1	2	3	4
1	Kabupaten Pasaman Barat	17.146,8	25,56
2	Kota Padang	14.320,6	21,34
3	Kabupaten Dharmasraya	11.216,6	16,72
4	Kabupaten Pesisir Selatan	9.451,3	14,09
5	Kabupaten Solok	7.983,9	11,90
6	Kabupaten Kep. Mentawai	2.635,9	3,93
7	Kabupaten Agam	1.853,5	2,76
8	Kabupaten Solok Selatan	1.544,1	2,30
9	Kabupaten Pasaman	724,5	1,08
10	Kabupaten Padang Pariaman	182,0	0,27
11	Kota Bukittinggi	31,4	0,05
12	Kabupaten Tanah Datar	2,0	0,00
13	Kabupaten Sijunjung	-	-
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-
15	Kota Solok	-	-
16	Kota Sawahlunto	-	-

17	Kota Padang Panjang	~	~
18	Kota Payakumbuh	~	~
19	Kota Pariaman	~	~
<b>TOTAL</b>		<b>67.092,60</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.11 diatas, diperoleh informasi bahwa lokasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbanyak lima besar adalah di Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai investasi sebesar USD 17.146,8 ribu atau sebesar (25,56%), kemudian disusul dengan Kota Padang dengan nilai investasi sebesar USD 14.320,6 ribu atau sebesar (21,34%), Kabupaten Dharmasraya dengan nilai investasi sebesar USD 11.216,6 ribu atau sebesar (16,72%), Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai investasi sebesar USD 9.451,3 ribu atau sebesar (14,09%) dan Kabupaten Solok dengan nilai investasi sebesar USD 7.983,9 ribu atau sebesar (11,90%).

Sedangkan kontribusi PMDN berdasarkan sektor usaha, realisasi PMDN dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Nilai Investasi PMDN**  
**Berdasarkan Sektor**  
**Tahun 2022**

NO	SEKTOR USAHA MENURUT PERKA No. 17 Tahun 2015 BKPM RI	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI ( PMDN )	
		Rupiah ( juta)	%
1	2	3	4
<b>A. PMDN</b>		<b>3.411.616,80</b>	<b>54,86</b>
<b>I. Sektor Primer</b>		<b>1.838.741,70</b>	<b>29,57</b>
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1.527.530,60	24,56
2.	Kehutanan	21.963,90	0,35
3.	Perikanan	4.392,60	0,07
4.	Pertambangan	284.854,60	4,58
<b>II. Sektor Sekunder</b>		<b>475.922,00</b>	<b>7,65</b>
5.	Industri Makanan	384.889,00	6,19
6.	Industri Tekstil	-	-
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-
8.	Industri Kayu	663,00	0,01
9.	Industri Kertas dan Percetakan	11.345,20	0,18
10.	Industri Kimia dan Farmasi	1.641,50	0,03
11.	Industri Karet dan Plastik	11.940,10	0,19
12.	Industri Mineral Non Logam	65.256,20	1,05
13.	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	6,50	0,00

14.	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transporasi Lainnya	177,80	0,00
16.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan	2,70	0,00
17.	Industri Lainnya	-	-
<b>III.</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>1.096.953,10</b>	<b>17,64</b>
18.	Listrik, Gas dan Air	144.952,40	2,33
19.	Konstruksi	348.990,10	5,61
20.	Perdagangan dan Reparasi	136.698,30	2,20
21.	Hotel dan Restoran	76.425,60	1,23
22.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	249.174,40	4,01
23.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	17.520,70	0,28
24.	Jasa Lainnya	123.191,60	1,98
<b>B.</b>	<b>UMK</b>	<b>2.807.400,00</b>	<b>45,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.219.016,80</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel 3.12 Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan sektor usaha pada tahun 2023 lima besar didominasi didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) Rp. 2.807.400,00 juta atau sebesar (45,14%), sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp. 1.527.530,00 juta atau sebesar (24,56%), sektor usaha Industri Makanan sebesar Rp. 384.889,00,00 juta atau sebesar (6,19%), sektor usaha Konstruksi sebesar 348,990,10 juta atau sebesar ( 5,61% ), sektor usaha Pertambangan sebesar Rp. 284.854,60 juta atau sebesar (4,58%), sektor usaha Transportasi, Gudang dan Komunikasi sebesar Rp. 249.174,40 atau sebesar (4,01%).

Berdasarkan Lokasi, kontribusi Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Realisasi Nilai Investasi PMDN dan UMK  
Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota  
Tahun 2023

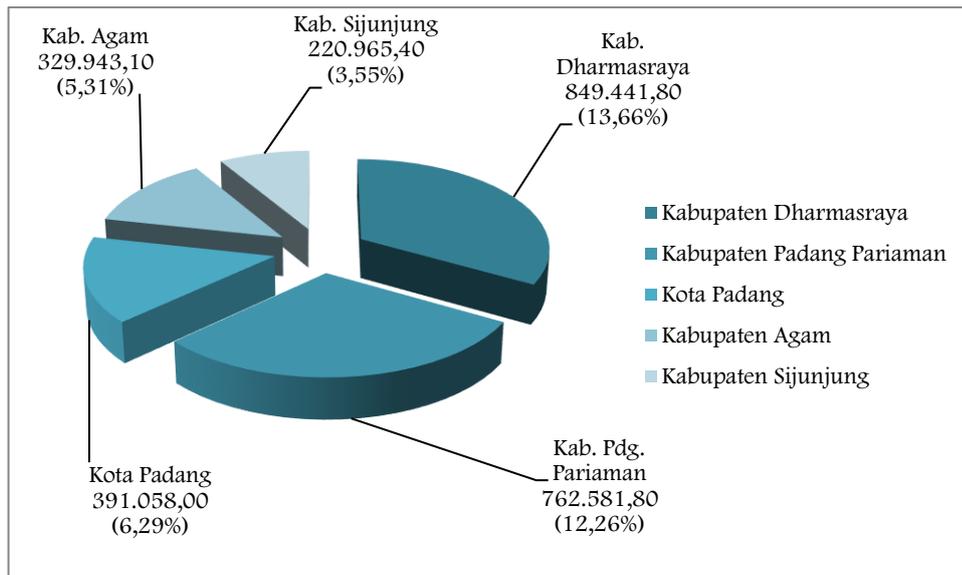
NO	LOKASI	INVESTASI ( juta Rp)	%
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PMDN</b>	<b>3.411.616,80</b>	<b>54,86</b>
1.	Kabupaten Dharmasraya	849.441,80	13,66
2.	Kabupaten Padang Pariaman	762.581,80	12,26
3.	Kota Padang	391.058,00	6,29
4.	Kabupaten Agam	329.943,10	5,31
5.	Kabupaten Sijunjung	220.965,40	3,55
6.	Kabupaten Solok Selatan	220.299,60	3,54
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	158.951,30	2,56
8.	Kota Sawahlunto	158.553,20	2,55
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	96.417,60	1,55
10.	Kabupaten Pasaman	63.790,20	1,03
11.	Kota Payakumbuh	53.904,10	0,87
12.	Kabupaten Pasaman Barat	39.969,00	0,64
13.	Kota Solok	21.858,70	0,35
14.	Kabupaten Tanah Datar	13.770,20	0,22
15.	Kabupaten Solok	11.960,10	0,19
16.	Kota Bukittinggi	7.658,10	0,12
17.	Kota Padang Panjang	7.183,80	0,12
18.	Kabupaten Kep. Mentawai	2.967,60	0,05
19.	Kota Pariaman	342,40	0,01
<b>B.</b>	<b>UMK</b>	<b>2.807.400,00</b>	<b>45,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.219..016,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.13 diatas, diperoleh informasi bahwa lokasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbanyak lima besar adalah Kab. Dharmasraya dengan nilai investasi sebesar Rp. 849.441,80 juta atau sebesar (13,66%), kemudian disusul dengan Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai investasi sebesar Rp. 762.581,80 juta atau sebesar (12,26%), Kota Padang dengan nilai investasi sebesar Rp. 391.058,00 juta atau sebesar (6,29%), Kabupaten Agam dengan nilai investasi sebesar Rp.

329.943,10 juta atau sebesar (5,31%) dan Kabupaten Sijunjung dengan nilai investasi sebesar Rp. 220.965,40 juta atau sebesar (3,55%).

**Grafik 3.2**  
**Lima Besar Investasi PMDN berdasarkan Lokasi Kabupaten/kota**  
**Tahun 2023 \*)**



*Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat*

Melihat perkembangan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, baik itu secara regional dan nasional posisi Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 masih berada di posisi terendah dalam realisasi investasi baik itu PMA maupun PMDN.

Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi, Provinsi Sumatera Barat berada diperingkat ke **26**, dengan realisasi Investasi sebesar **Rp. 3.411.6 (milyar)**, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2022 turun 2 tingkat (peringkat 24), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14  
Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat  
Secara Nasional  
Tahun 2021 – 2023

NO	URAIAN	PERINGKAT TAHUN		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	NASIONAL	22	24	26

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan untuk Realisasi Investasi PMA peringkat Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi Provinsi Sumatera Barat berada diperingkat *ke 27* dengan realisasi Investasi sebesar *US\$. 67,1 (juta)*, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2021 naik 4 peringkat (peringkat 23), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15  
Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat  
Secara Nasional  
Tahun 2021 – 2023

NO	URAIAN	PERINGKAT TAHUN		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	NASIONAL	27	23	27

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan secara Regional Sumatera Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat *ke 10* dengan realisasi Investasi sebesar *Rp. 3.411,6 (Milyar)*, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2022 sama (peringkat 10), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16  
Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat  
Secara Regional  
Tahun 2021 – 2023

NO	URAIAN	PERINGKAT TAHUN		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	REGIONAL SUMATERA	9	10	10

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan secara Regional Sumatera Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat Se-Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat *ke 7*, dengan realisasi Investasi sebesar *US\$. 67,1 (Juta)*, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2021 turun 1 tingkat (peringkat 6), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17  
Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat  
Secara Regional  
Tahun 2021 – 2023

NO	URAIAN	PERINGKAT TAHUN		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	REGIONAL SUMATERA	7	9	7

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Pada Tahun 2023, dengan masuknya realisasi Investasi dari Usaha Mikro Kecil yang menjadi salah satu pendorong meningkatnya realisasi investasi secara Nasional khususnya di Provinsi Sumatera Barat, realisasi investasi Usaha Miro Kecil (UMK) Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke 12 dari 38 Provinsi di Indonesia dengan realisasi investasi pada Usaha Mikro Kecil sebesar Rp. 2.807,4 ( milyar ) atau sebesar 2,02 % dari realisasi investasi Usaha Mikro Kecil, seperti tergambar dalam tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18  
Realisasi Investasi Usaha Mikro Kecil  
Tahun 2023

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp. Miliar)	%
1	Jawa Barat	24.058,8	17,33
2	Jawa Timur	16.620,8	11,97
3	DKI Jakarta	16.291,0	11,74
4	Jawa Tengah	10.689,9	7,70
5	Banten	8.499,3	6,12
6	Sulawesi Selatan	5.348,6	3,85
7	Bali	4.927,9	3,55
8	Sumatera Utara	4.688,8	3,38
9	Kalimantan Timur	3.597,4	2,59
10	Riau	3.432,8	2,47
11	Sumatera Selatan	3.012,6	2,17
12	<b>Sumatera Barat</b>	<b>2.807,4</b>	<b>2,02</b>
13	Lampung	2.751,1	1,98
14	Kalimantan Selatan	2.662,5	1,92
15	Kalimantan Barat	2.523,5	1,82
16	Nusa Tenggara Barat	2.455,6	1,77
17	Kepulauan Riau	2.207,6	1,59
18	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.202,8	1,59
19	Aceh	1.965,4	1,42
20	Sulawesi Tenggara	1.932,1	1,39
21	Sulawesi Tengah	1.894,8	1,37
22	Kalimantan Tengah	1.772,2	1,28
23	Nusa Tenggara Timur	1.548,2	1,12
24	Jambi	1.466,0	1,06
25	Sulawesi Utara	1.304,6	0,94
26	Kepulauan Bangka Belitung	1.009,8	0,73
27	Papua	916,8	0,66
28	Bengkulu	830,7	0,60
29	Maluku Utara	703,2	0,51
30	Kalimantan Utara	663,0	0,48
31	Papua Barat	656,8	0,47
32	Maluku	596,6	0,43
33	Sulawesi Barat	578,1	0,42
34	Papua Pegunungan	564,7	0,41
35	Gorontalo	503,9	0,36

36	Papua Tengah	475,5	0,34
37	Papua Selatan	344,2	0,25
38	Papua Barat Daya	306,4	0,22
<b>TOTAL</b>		<b>138.811,4</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat*

Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang koordinasi yang lebih intens dengan kabupaten/kota terkait pengawasan, pemantauan dan pembinaan kepada perusahaan PMA dan PMDN yang berada di wilayahnya serta ketersediaan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor, selain itu keberhasilan ini juga ditunjang, oleh :

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan teknis terhadap Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal, untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan kepada 575 pelaku usaha;
2. Melakukan Pengawasan dan Inspeksi / Pengawasan Ke lapangan / perusahaan dalam hal meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal, untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan pengawasan kepada 84 pelaku usaha;
3. Memfasilitas penyelesaian permasalahan investasi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal antara pelaku usaha, masyarakat dan pihak lainnya yg diperoleh dari pelaksanaan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal, untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan 10 fasilitasi permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal;
4. Memfasilitasi kemitraan antar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan SIMITRA ( Sistem Informasi Kemitraan Usaha), untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan kepada 512 pelaku usaha dalam forum komunikasi pelaku usaha dengan terealisasi 35 dokumen kemitraan.

5. Melakukan pengembangan 2 sistem informasi yaitu SIPOPEI ( Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi) updating data potensi dan peluang investasi

Hambatan dan kendala Peningkatan Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat, disamping yang dijabarkan diatas juga disebabkan oleh:

1. Belum adanya Kebijakan Strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat terkait dengan prose penetapan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha yang cukup lama;
2. Perubahan sistem pelaporan dari OSS versi 1.1 ke OSS –RBA mengharuskan perusahaan untuk migrasi data terlebih dahulu;
3. Banyaknya perusahaan yang belum melaporkan LKPM karena ketidak tahuan perusahaan tersebut terhadap kewajiban dalam penyampaian LKPM dan karena keterbatasan SDM perusahaan yang memahami tatacara pelaporan LKPM;
4. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya serta aksesibilitas yang sulit dijangkau.
5. Masih ada perusahaan yang belum mau melaporkan kegiatan penanaman modal, dari 200 perusahaan yang menjadi kewenangan provinsi yang belum melaporkan kegiatan penanaman modanya sebanyak 116 perusahaan yang belum melaporkan LKPMnya.
6. Banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS-RBA dan LKPM.
7. Keterlambatan pemenuhan izin oleh pelaku usaha akiba tsistem yang baru melalui OPD Teknis seperti RTRW, RDTR, IzinL lingkungan,PKKPR, SIMBG, dan syarat teknis lainnya.
8. Belum Clear and Cleannya Tanah lokasi untuk berinvestasi., disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat;
9. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi

melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.

Untuk meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyiapkan Kebijakan Strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat;
2. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk melakukan migrasi Data Perusahaan;
3. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha terkait kewajiban dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
4. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun RTRW dan RDTR yang mendukung investasi di daerahnya;
5. Melakukan Pengawasan dan Inspeksi / Pengawasan Ke lapangan / perusahaan dalam hal meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal
6. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha dan OPD teknis terkait dengan kebijakan Perizinan dan Kemudahan Berusaha sekaligus penerbitan NIBnya;
7. Menyenggarakan forum komunikasi pelaku usaha daerah untuk mempertemukan antarpelaku usaha dalam suatu acara.
8. Tetap melakukan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
9. Pengembangan Sistem terkait Informasi Potensi dan Peluang Investasi serta Lokasi Investasi berbasis Teknologi Informasi.
10. Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
11. Mempercepat ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

12. Mendorong Provinsi, Kabupaten / Kota untuk melakukan revisi RTRW yang terbuka untuk Investasi.
13. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan)
14. Melakukan Sosialisasi Produk Hukum terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
15. Melakukan revisi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
16. Melakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
17. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 2.891.074.297,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.840.066.052,- atau sebesar 98,23%. Artinya masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pencapaian Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Barat lebih tinggi dari realisasi anggaran.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang mendorong pencapaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN, seperti tampak dalam tabel berikut :

Tabel 3.20  
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Mendukung Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat  
Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2023					
			FISIK			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	1.229.794.450	1.207.752.194	97,39
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi Yang Lengkap	100%	100%	100%	1.229.794.450	1.207.752.194	98,21
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 orang	80 orang	100%	72.260.900	72.074.400	99,74
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Aparatur Kab/Kota/Provinsi yang mengikuti Bimtek Pemetaan potensi dan peluang investasi	50 orang	50 orang	100%	1.157.533.550	1.135.677.794	98,11
		Jumlah Aplikasi Pemetaan dan Kemitraan yang Dikelola dan Dikembangkan	2 aplikasi	2 aplikasi	100%			
		Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	25 kesepakatan	35 kesepakatan	140%			
		Terlaksananya Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah	512 orang	512 orang	100%			
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	4 pernyataan minat	14 pernyataan minat	350%	471.900.650	471.025.223	99,81

3.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Pernyataan Minat</b>	<b>4 pernyataan minat</b>	<b>14 pernyataan minat</b>	<b>350%</b>	<b>471.900.650</b>	<b>471.025.223</b>	<b>99,81</b>
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Materi Promosi Sesuai Potensi Investasi Daerah Yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	65.655.000	65.544.625	99,83
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terfasilitasinya Calon Investor Kelokasi Proyek Investasi di Sumatera Barat	1 laporan	1 laporan	100%	406.245.650	405.480.598	99,81
		Terlaksananya Keikutsertaan DPMPTSP Dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan Atau Luar Negeri Melalui Pameran atau Temu Bisnis	3 kali	3 kali	100%			
		Tersebaranya Informasi Penanaman Modal Melalui Media Massa	5 kali	5 kali	100%			
		Terlaksananya Pembuatan Video Promosi	1 video	1 video	100%			
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)*</b>	<b>5,6 T</b>	<b>7,2 T</b>	<b>128,73%</b>	<b>1.151.176.997</b>	<b>1.123.325.435</b>	<b>89,26</b>
4.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)*</b>	<b>5,6 T</b>	<b>7,2 T</b>	<b>128,73%</b>	<b>1.151.176.997</b>	<b>1.123.325.435</b>	<b>89,26</b>
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi penanaman modal	1 laporan	1 laporan	100%	9.110.000	9.110.000	100,00
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMA/PMDN yang Difasilitasi Permasalahannya	10 PMA/PMDN	10 PMA/PMDN	100%	721.815.700	694.335.475	96,19
		Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	575 orang	575 orang	100%			
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	30 pelaku usaha	84 pelaku usaha	280%	420.251.297	419.879.960	99,91

5.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	40%	40%	100%	38.202.200	37.963.200	99,37
5.1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	40%	40%	100%	38.202.200	37.963.200	99,37
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	100%	38.202.200	37.963.200	99,37
<b>TOTAL</b>						<b>2.891.074.297</b>	<b>2.840.066.052</b>	<b>98,23</b>

Sumber : Laporan Keuangan DPMPPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

*Sasaran Strategis 1.2*  
*“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu “*

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu“ dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Teknik analisis data Indeks Kepuasan Masyarakat ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan, yakni dengan memberikan rentang skor antara 1 - 4. Skor 1 kriterianya apabila prosedur pelayanan tidak sederhana atau (tidak mudah). Skor 2 apabila prosedur pelayanan (kurang mudah), skor 3 (mudah) dan skor 4 (sangat mudah). Skor pada masing-masing unsur pelayanan itu dijumlahkan berdasarkan responden yang memberikan skor.

Kemudian tahap kedua dengan melihat nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dihitung dengan menggunakan bobot nilai rata-rata tertimbang, dimana formulanya adalah setiap unsur pelayanan dari total unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus : Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur. Untuk nilai penimbang dalam survei di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah :

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur layanan yang bersifat online :

$$= 1/10$$

$$= 0,100$$

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur layanan yang bersifat offline :

$$= 1/17$$

$$= 0,059$$

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur layanan yang digunakan dalam perhitungan nilai SKM DPM & PTSP adalah dengan mengambil unsur yang sama untuk bisa digabungkan dalam perhitungan nilai bersama. Adapun jumlah unsur yang sama dari dua jenis layanan online dan offline sebanyak 9 unsur, sehingga dapat dihitung nilai rata-rata tertimbang sebagai berikut :

$$= 1/9$$

$$= 0,111$$

Metode ketiga, yakni dengan melihat nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikali dengan nilai penimbang yaitu 25.

Melalui 3 (tiga) metode itulah diketahui Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, setelah dikalikan dengan nilai penimbang 25, maka kinerja pelayanan dapat ditentukan sesuai dengan jumlah hasil perkalian dengan nilai pelayanan sesuai kelas interval dibawah ini :

**Tabel 3.21**  
**Kelas Interval Survei**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5
1.	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2.	2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3.	3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	BAIK
4.	3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017

Melalui 3 tahapan itulah diketahui hasil nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada semua jenis layanan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 3.22**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 1.2**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75/ 3,41	96,48 /3,81	116,59 / 111,73

*Sumber : Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023*

Level dan kategori pengukuran kinerja Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1.

Dari tabel 3.22 di atas terlihat bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja **Memuaskan** sebesar **116,59% / 111,73%**

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Capaian kinerja tahun n dengan Target Kinerja tahun n, seperti di bawah ini:

**Capaian Indikator Kinerja Nilai Interval Konversi Survei  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Interval Konversi Survei  
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n}}{\text{Target Nilai Interval Konversi Survei I  
ndeks Kepuasan Masyarakat tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{96,48}{82,75} \times 100\%$$

$$= 116,59\%$$

**Capaian Indikator Kinerja Nilai Interval Survei  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Interval Survei  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}}{\text{Target Nilai Interval Survei  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,81}{3,41} \times 100\%$$

$$= 111,73\%$$

Terkait dengan indikator kinerja dari Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Penilaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tetap melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

Adapun tujuan dari survei ini adalah disamping untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan juga untuk mengetahui unsur – unsur apa saja yang harus ditingkatkan dan dipertahankan terkait komponen dalam IKM, sedangkan

manfaat yang didapat adalah mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan.

Hasil pelaksanaan 2 kali survei diperoleh nilai unsur pelayanan, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, sebagaimana tabel 3.23 berikut:

**Tabel 3.23**  
**Nilai Indeks Unsur Pelayanan Yang Di Observasi**  
**Tahun 2023**

No	Unsur Pelayanan Yang di Observasi	Nilai Interval IKM Unsur Pelayanan Yang Di Observasi		
		Semester 1	Semester 2	Jumlah Rata-Rata
1	2	3	4	5 = (3 + 4) / 2
1.	Persyaratan	0,444	0,444	0,443
2.	Prosedur Pelayanan	0,404	0,4155	0,422
3.	Waktu pelayanan	0,400	0,4145	0,422
4.	Biaya/tarif	0,443	0,4425	0,443
5.	Produk layanan	0,425	0,4295	0,428
6.	Kompetensi pelaksana	0,415	0,427	0,410
7.	Perilaku pelaksana	0,437	0,4375	0,428
8.	Penanganan Pengaduan	0,429	0,4325	0,425
9.	Saran dan Prasarana	0,408	0,417	<b>0,395</b>
Nilai Interval IKM		<b>3,803</b>	<b>3,915</b>	<b>3,859</b>
Nilai Interval Konversi IKM		3,803 x 25	3,915 x 25	<b>3,859 x 25</b>
Nilai Interval Konversi IKM		95,508	97,88	<b>96,475</b>

Sumber : Bidang FKPL DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

Dari tabel 3.23 di atas, unsur pelayanan terkait dengan Penanganan Pengaduan untuk pelaksanaan 2 kali survei yang dilaksanakan harus menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, karena masih dianggap kurang baik hasil surveinya dengan hasil sebesar **0,395** dari 8 ( delapan ) unsur sarana dan prasarana yang dinilai masih di bawah **0,400** oleh penerima hasil layanan, sedangkan yang lain hasilnya sudah diatas **0,400**

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 dengan tahun 2022, digambarkan pada tabel 3.24

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )**  
**Tahun 2021 – 2023**

NO	URAIAN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	82,60/3,40	83,02/3,40	100,51%/100%
2.	2022	82,60/3,40	95,35/3,41	115,44%/100,29%
3.	2023	82,75/3,41	96,48/3,81	116,59%/111,73%

*Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat*

Dari tabel 3.24 dapat dilihat capaian kinerja indikator kinerja nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target Nilai Interval Konversi IKM **82,75** terealisasi sebesar **96,48** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **116,59%** dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar **1,15%** (**115,19%**), sedangkan untuk Nilai Interval IKM dari target sebesar **3,41** dapat direalisasikan sebesar **3,81** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **111,73%** dibandingkan dengan tahun 2022 tingkat capaian kinerja ini mengalami kenaikan sebesar **11,44%** (**100,29%**).

Pencapaian target survei indeks kepuasan masyarakat ini sangat bergantung kepada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat khususnya sub rumpun Pelayanan Terpadu satu Pintu. Selama tahun 2023 jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu, dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut ini :

Tabel 3.25  
Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu  
Tahun 2023

NO	SEKTOR PERIZINAN	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS BERESIKO	PERIZINAN BERUSAHA NON OSS	PERIZINAN NON BERUSAHA	NON PERIZINAN	JUMLAH	TEPAT WAKTU PTSP (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perikanan dan Kelautan	811	~	~	~	811	94%
2	Kehutanan	7	33	1	9	50	83%
3	Kesehatan	27	~	~	~	27	85%
4	Perhubungan	24	~	5	81	110	85%
5	Ketenagakerjaan	4	~	~	4	8	85%
6	Perindustrian	817	~	~	~	817	~
7	Perdagangan	5	~	~	1	6	80%
8	Pertanian	92	~	~	~	92	80%
9	Pendidikan	~	~	20	~	20	77%
10	Peternakan dan Kesehatan Hewan	~	~	~	119	119	95%
11	Energi dan Sumber Daya Mineral	157	8	~	~	165	86%

12	Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	3	34	~	~	37	85%
13	PSDA	~	~	~	~	~	~
14	SOSIAL	~	~	24	3	27	86%
15	Pemukiman dan Perumahan	~	~	~	~	~	0%
16	Pariwisata	32	~	~	~	32	0%
17	Lingkungan Hidup	~	35	~	~	35	83%
18	Koperasi UMKM	~	~	~	~	~	~
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	~	~	~	1492	1492	98%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1979</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>1.709</b>	<b>3.848</b>	<b>86%</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>2139</b>	<b>1.709</b>	<b>3.848</b>	

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2022

Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga ditunjang koordinasi yang lebih intens dengan kabupaten/kota, OPD Teknis terkait Penerbitan Izin dan Konsultasi Pelayanan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha disamping ketersediaan informasi tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang informatif bagi para pelaku usaha, selain itu keberhasilan ini juga ditunjang, oleh :

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha dan OPD teknis terkait dengan kebijakan Perizinan dan Kemudahan Berusaha sekaligus penerbitan NIBnya, untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan kepada 1.500 pelaku usaha Usaha Mikro Kecil;
2. Melaksanakan Pelayanan Langsung terhadap pelaku usaha yang terkendala dalam hal mengoperasikan system (aplikasi OSS) di Kantor / Front Office;
3. Terinformasi tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang informatif bagi para pelaku usaha baik secara langsung maupun lewat website DPMPTSP;

Hambatan dan kendala Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkait penerbitan disebabkan oleh:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online;
2. Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat;
3. Masih rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik);
4. Terbatasnya jumlah aparatur penyelenggara perizinan;
5. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;
6. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka;

7. Sistem Perizinan Online Single Submissin ( OSS ) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Untuk meningkatkan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang Aturan – Aturan yang selalu Berubah dengan Mengadakan Layanan Langsung kepada Pelaku Usaha;
2. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato dan OSS bagi masyarakat, pelaku usaha dan SKPD Teknis Terkait;
3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat;
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementrian / Lembaga terkait;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD melalui Tim Teknis atau penyelenggara perizinan Provinsi Sumatera Barat;
6. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato terhadap perizinan yang tidak diatur pada OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar **Rp. 2.408.684.900,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.388.205.124,-** atau sebesar **99,15%**. Artinya terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tinggi dari realisasi anggaran yakni sebesar **116,59%**.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang mendorong pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.26  
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2023					
			FISIK			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82,75	96,48	116,59%	2.408.684.900	2.388.205.124	99,15
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	85,52%	86%	100,56%			
4.1	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82,75	96,48	116,59%	2.408.684.900	2.388.205.124	99,15
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	85,52%	86%	100,56%			
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	85,52%	86%	100,56%	2.182.124.550	2.161.931.674	99,07
		Jumlah Sistem Aplikasi Perizinan Terintegrasi Sesuai SOP yang Dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi	100%			
		Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	2.944 Izin / Non Izin	3.848 Izin / Non Izin				
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Langsung Perizinan	1.464 orang	1.464 orang	100%			
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang Diselenggarakan	2 kali	2 kali	100%	97.498.000	97.348.000	99,85

	Perizinan Penanaman Modal							
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terfasilitasinya/Termediasinya Pengaduan Izin yang Bermasalah	10 pengaduan	14 pengaduan	140%	129.062.350	128.925.450	99,89
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	3 kali	3 kali	100%			

*Tujuan 2***“Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani “**

Tujuan kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Meningkatkan Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani, memiliki 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Indikator kinerja dari sasaran strategis yang menjadi bagian dari pencapaian tujuan kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sama dengan indikator kinerja tujuan Meningkatkan Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani, dimana pencapaian indikator tujuan maupun indikator sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel 3.27, berikut:

**Tabel 3.27**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2**  
**“Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani “**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			Target Tahun 2024
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,25)	BB (79,63)	99,23%	A (80,25)
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,25)	BB (79,63)	99,23%	A (80,25)

Dari tabel 3.27 di atas terlihat bahwa hasil capaian dari indikator kinerja pertama Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan A dengan Nilai 80,25, dan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan BB dengan nilai 79,63 dengan level capaian kinerja Sangat Baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,23%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, seperti digambarkan pada tabel 3.28 berikut ini:

**Tabel 3.28**  
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja  
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD  
Tahun 2021 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	80,00 / BB	77,53 / BB	96,91 %
2.	2022	80,00 / BB	79,39 / BB	99,23 %
3.	2023	80,25 / A	79,63 / BB	99,23 %

*Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat*

Capaian Kinerja dari indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, nilainya mengalami kenaikan sebesar **0,24** dibandingkan capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yang sebesar **79,39**. Capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak sesuai dengan yang ditarget dengan nilai **A**, baik itu dari tujuan maupun sasaran strategis dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

1. Komitmen tinggi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilakukan untuk melihat sampai dimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja
3. Penegakan pemberian reward dan punishment berupa pengurangan tambahan penghasilan kepada beberapa aparatur.

Perbandingan hasil penilaian dari laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan tahun 2021, berdasarkan kategori akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat dilihat dalam tabel 3.29 berikut ini:

Tabel 3.29  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2021-2022 dan Target 2023

NO	TAHUN / BOBOT	BOBOT	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7
1.	PERENCANAAN KINERJA	30%	25,77%	25,68%	26,42%
2.	PENGUKURAN KINERJA	25%	20,45%	21,15%	21,08%
3.	PELAPORAN KINERJA	15%	13,48%	13,56%	11,64%
4.	EVALUASI INTERNAL	10%	8,00%	7,96%	20,50%
5.	PENCAPAIAN SASRAN /KINERJA ORGANISASI	10%	9,83%	11,04%	-
TOTAL		100%	77,53%	79,39%	79,64%

Dari tabel 3.24 diatas , dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) kategori evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari 5 (lima) kategori mencapai hasil yang *Sangat Baik*.

Hambatan peningkatan implementasi SAKIP tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah :

1. Cascading kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dan staf dalam menerapkan SAKIP masih belum merata.
3. Sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja masih belum terintegrasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP, adalah:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja,

dengan:

- a. Melakukan pembahasan cascading kinerja dan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ( keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan kinerja ).
  - b. Melakukan keselarasan indikator kinerja yang ada dengan dokumen perjanjian kinerja dengan SKP
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai Perjanjian Kinerja level Staf
  3. Penyusunan SKP sudah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja
  4. Monitoring pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar **Rp. 3.276.707.192,-** di luar pagu anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN dan terealisasi sebesar **Rp. 3.228.609.864,-** atau sebesar **98,53%**.

Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Hal ini tampak dari persentase capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **100%** lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar **98,53%** ( tingkat efisien sebesar **1,47%**).

Anggaran sebesar **Rp. 3.276.707.192,-** tersebut tersebar pada 1 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dan Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian tujuan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut ini:

Tabel 3.30  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
 Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi  
 Tahun 2023**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022					
			FISIK			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	9.876.936.725	9.798.907.903	99,21
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	85%	85%	100%	104.230.030	103.946.050	99,73
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	6 dokumen	6 dokumen	100%	72.302.000	72.101.000	99,72
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	31.928.030	31.845.050	99,74
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	7.056.222.613	7.000.335.325	99,21
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN Yang Dibayarkan gaji dan Tunjangannya	45 orang	45 orang	100%	6.874.188.783	6.819.880.925	99,21
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Honor	11 orang	11 orang	100%	158.416.000	157.056.000	99,14
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Yang Disiapkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Yang Disiapkan	14 dokumen	14 dokumen	100%	23.617.830	23.398.400	99,07
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	100%	100%	18.400.000	18.364.350	99,81
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diasuransikan	3 unit	3 unit	100%	18.400.000	18.364.350	99,81

LAPORAN KINERJA DPM & PTSD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

I.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	97.646.190	96.995.225	99,33
I.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	70 orang	100%	45.736.940	45.377.209	99,21
I.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	14 orang	100%	51.909.250	51.618.016	99,44
I.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	1.157.757.947	1.154.712.551	99,74
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 jenis	17 jenis	100%	25.604.100	25.358.000	99,04
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	100%	102.602.990	102.291.000	99,70
I.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	34 jenis	34 jenis	100%	91.979.500	91.839.800	99,85
		Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah yang Dilakukan	15 kali	15 kali	100%			
I.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	100%	20.103.296	20.102.750	100,00
I.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	6 jenis	6 jenis	100%	17.080.000	17.040.000	99,77
I.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	62 laporan	62 laporan	100%	750.391.751	750.096.973	99,96
I.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	149.996.310	147.984.028	98,66
		Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia	3 unit	3 unit	100%			
I.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai Dengan Perencanaan Daerah</b>	100%	100%	100%	7.265.920	7.225.000	99,44
I.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Baru	1 unit	1 unit	100%	7.265.920	7.225.000	99,44
I.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%	1.052.974.085	1.040.225.083	98,79

LAPORAN KINERJA DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

I.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar Dalam 1 Tahun	400 surat	630 surat	100%	23.654.500	23.269.222	98,37
I.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan Telepon/Fax yang dibayarkan	3 rekening	3 rekening	100%	152.100.000	151.259.792	99,45
		Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan	41.500 KWA	41.500 KWA	100%			
I.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	18 orang	18 orang	100%	877.219.585	865.696.069	98,69
<b>I.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>382.439.940</b>	<b>377.104.319</b>	<b>98,60</b>
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%	45.967.500	44.727.384	97,30
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Yang Dipelihara	3 unit	3 unit	100%			
I.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara	7 unit	7 unit	100%	178.827.000	175.971.835	98,40
I.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel Yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%	7.000.000	6.950.000	99,29
I.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55 unit	55 unit	100%	43.235.440	42.176.600	97,55
I.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	100%	107.410.000	107.278.500	99,88
<b>TOTAL</b>						<b>9.876.936.725</b>	<b>9.798.907.903</b>	<b>99,21</b>

## Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan capaian kinerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023, jika diperbandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, dapat terlihat pada tabel 3.31

Realisasi kinerja tujuan pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat “ **Meningkatnya Pertumbuhan Investasi** “ dengan indikator kinerja “ **Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi**” tahun 2023, dengan realisasi sebesar **38,64%** kondisi sampai dengan triwulan 3 dengan capaian kinerja sebesar **483%**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi kinerja tujuan pertama ini jauh mengalami peningkatan, yakni sebesar **482,21% (0,79%)**.

Banyak faktor yang mengakibatkan naiknya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat tahun 2023 ini, salah satunya disebabkan kebijakan dan regulasi terkait dimasukkannya realisasi investasi yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) dimana perhitungannya dilakukan pada semester 1 dan semester 2 tahun berjalan sebab sebagaimana yang kita ketahui sejak pasca pandemi covid 19 pelaku usaha mikro kecil merupakan penyumbang yang cukup besar berjalannya perekonomian baik secara regional maupun nasional.

Terkait dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi **Meningkatnya Pertumbuhan Investasi** dengan indikator kinerja **Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi** yang menjadi tujuan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Dengan dua Sasaran Strategis, dimana sasaran strategis pertama **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat** dengan indikator kinerja

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dapat direalisasikan sebesar Nilai sebesar 7.211.987.280.000,- atau sebesar 128,72% dari yang ditarget yang diperjanjikan dalam perjanjian sebesar Rp. 5.602.670.000.000,-. Dibandingkan dengan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2022, realisasi kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.010.252.990.000,- ( Rp. 5.201.734.290.000,- )

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja terkait dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 3.31 berikut:

**Tabel 3.28**  
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja  
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD  
Tahun 2021 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	6 %	5,02%	83,67 %
2.	2022	6 %	0,79 %	13, 17 %
3.	2023	8 %	38,64 %	483 %

*Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat*

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian realisasi investasi PMA dan PMDN ditahun 2023 ini adalah:

6. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan teknis terhadap Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal, untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan kepada 575 pelaku usaha;
7. Melakukan Pengawasan dan Inspeksi / Pengawasan Ke lapangan / perusahaan dalam hal meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal, untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan pengawasan kepada 84 pelaku usaha;
8. Memfasilitas penyelesaian permasalahan investasi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal antara pelaku usaha, masyarakat dan pihak

lainnya yg diperoleh dari pelaksanaan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal, untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan 10 fasilitasi permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal;

9. Memfasilitasi kemitraan antar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan SIMITRA ( Sistem Informasi Kemitraan Usaha), untuk tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan kepada 512 pelaku usaha dalam forum komunikasi pelaku usaha dengan terealisasi 35 dokumen kemitraan.
10. Melakukan pengembangan 2 sistem informasi yaitu SIPOPEI ( Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi) updating data potensi dan peluang investasi

Sasaran strategis kedua dari tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dapat direalisasikan dengan Nilai Interval IKM sebesar **95,35** dan Nilai Interval Konversi IKM sebesar **3,81** dengan capaian kinerja sebesar **115,44% /112,06%**, hasil ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana capaian kinerjanya hanya sebesar **100,51%/97,65%**.

Pencapaian tujuan kedua Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani memiliki indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dengan realisasi sebesar **80,50** dengan nilai **A** sesuai dengan target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar **1,11** dibandingkan capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yang sebesar **79,39**.

Capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang ditarget dengan nilai **A** baik itu dari tujuan maupun sasaran strategis dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

1. Komitmen tinggi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
  2. Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilakukan untuk melihat sampai dimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja
  4. Penegakan pemberian reward dan punishment berupa pengurangan tambahan penghasilan kepada beberapa aparatur.
- seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26  
Perbandingan Realisasi Kinerja  
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD  
Tahun 2021-2026.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	~	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi *)	%	6%	6%	8%	5,02%	0,79%	38,64%	83,67%	13,17%	483%
		Meningkatnya Realisasi investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Total PMA ( ribu US \$ ) PMDN ( juta Rp. )	Juta Rp. ribu US \$ juta Rp.	4.894.000 135.000 2.950.000	5.187.640 143.100 3.127.000	5.602.670 70.000 4.594.670	5.161.169,30 66.949,00 4.183.713,90	5.201.734,29 141.780,18 3.167.188,71	7.211.987,28 67.092,60 6.219.016,80	105,46% 49,592% 141,82,%	100,27% 99,08% 101,29%	128,72% 95,85% 135,35%
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	83,02 / 3,32	95,35 / 3,81	96,48 / 3,81	100,51% / 97,65%	115,44% / 112,06%	116,59% / 111,73%
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	~	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	77,53 / BB	80 / BB	80,25 / A	77,53 / BB	79,39 / BB	79,64 / BB	100 / BB	99,237%	99,239%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	77,53 / BB	80 / BB	80,25 / A	77,53 / BB	79,39 / BB	79,64 / BB	100%	99,237%	99,239%

\*) Kondisi Triwulan 3 tahun 2023

## ANALISA EFISIENSI

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

**Tabel 3.27**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**  
**Tahun 2023**

N O	SASARAN STRATEGIS	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (juta)	Realisasi (juta)	% Capaian	Target (Rp.)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	5.602.670,	7.211.987,28	128,72%	2.891.074.297	2.840.066.052	98,24%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,60/ 3,41	96,48/ 3,81	116,59%/ 111,73%	2.408.684.900	2.388.205.124	99,15%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,25 / A	79,64 / BB	99,23%	3.002.747.942	2.979.026.978	99,21%

Tabel di atas menjelaskan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih dari 100%. Untuk sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, telah mencapai kinerja sebanyak 128,72% dengan realisasi anggaran sebesar 98,24% (2.840.066.052,-) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.891.074.297,-. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai standar pelayanan publik kinerjanya mencapai 116,59%/111,73% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,15% (Rp. 2.388.205.124,-) dari total anggaran sebesar Rp. 2.406.684.900,-, serta untuk sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, telah

mencapai kinerja sebanyak **99,23%** dengan realisasi anggaran sebesar **99,21%** (Rp. dari total anggaran yang dialokasikan diluar belanja gaji dan tunjangan ASN..

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.28 di bawah ini :

**Tabel 3.28**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Total (juta Rp.)	128,72%	98,24%	30,48%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	116,59%	99,15%	17,44%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	99,23%	99,21%	0,02%

## INOVASI

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.

Untuk memacu peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pada umumnya terkhusus untuk para investor dan pelaku usaha, terus melakukan inovasi – inovasi dalam pelayanannya sehingga pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai **peringkat 2 (dua)** tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat, serta **Nomine 6 (enam)** dari **38 (tiga puluh delapan)** Provinsi di Indonesia dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Kemudahan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Adapun inovasi – inovasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, diantaranya :

Tabel 3.29  
DAFTAR INOVASI DAERAH  
Tahun 2023

No	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Kematangan
1	Intensifikasi Perizinan Prioritas Bagi UMK (INTIP UMK)	Penerapan	penanaman modal	01/01/2021	29/01/2021	97.00
2	Pelayanan Satu Hari (NAN SARI)	Penerapan	penanaman modal	01/02/2021	22/02/2021	93.00
3	SMS Gate Way	Penerapan	penanaman modal	07/11/2020	18/12/2020	99.00
4	Sakato Sign (Sistem Penandatanganan Elektronik)	Penerapan	penanaman modal	20/11/2020	18/12/2020	93.00
5	SIP SAKATO (Sistim Informasi Perizinan Sakato)	Penerapan	penanaman modal	01/12/2020	01/01/2021	93.00
6	MOBILE TRACKING	Penerapan	penanaman modal	01/01/2020	07/01/2020	96.00
7	IPIN24 (Informasi dan Konsultasi Perizinan 24 jam)	Penerapan	penanaman modal	10/05/2021	17/06/2021	94.00
8	NAN MAKNYOSS (PELAYANAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION)	Penerapan	penanaman modal	01/01/2021	01/03/2021	96.00
9	SI WALI (SAHABAT IZIN WALI NAGARI)	Penerapan	penanaman modal	02/02/2021	02/02/2021	91.00
10	Duta Investasi	Penerapan	penanaman modal	24/08/2020	22/12/2020	96.00
11	JANGAN PANIK (Jaringan Perizinan Berbasis NIK)	Penerapan	penanaman modal	16/12/2019	02/01/2020	98.00
12	inLOVEST Sumbar	Penerapan	penanaman modal	03/08/2020	17/09/2020	94.00
13	JANJI TEMU (Gelar Potensi dan Temu Usaha)	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	26/11/2020	91.00
14	IKM Real Time	Penerapan	penanaman modal	05/10/2020	23/11/2020	88.00
15	SIPOPEI (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi)	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	21/12/2020	97.00
16	NASI PEPEZ (Layanan Sistim Informasi Permasalahan Perizinan)	Penerapan	penanaman modal	03/11/2020	28/12/2020	90.00
17	SIMITRA (Sistem Informasi Mitra Usaha)	Penerapan	penanaman modal	03/11/2019	04/02/2020	92.00
18	Serbu LKPM (Sistem Verifikasi dan Buru Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Penerapan	penanaman modal	04/11/2020	21/01/2021	94.00

LAPORAN KINERJA DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT **TAHUN 2023**

---

19	SADAR IZIN	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	15/12/2020	56.00
20	TAXI CEPAT (Tax Clearance Integrasi Perizinan dan Samsat)	Penerapan	penanaman modal	01/12/2019	01/01/2020	96.00
21	KEPALA KAKAP (Kepastian Pelayanan Langsung Bersama Penerbitan Izin Sektor Perikanan Tangkap)	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	01/12/2020	96.00

## PENGHARGAAN

Untuk memberikan apresiasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (FTSP), Kementerian Investasi BKPM RI melakukan penilaian atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah tahun 2023 bagi semua Pemerintahan Daerah baik itu Provinsi, Kabupaten / Kota maupun Kementerian dan Lembaga tingkat Pusat.

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum berhasil masuk dalam **6 (enam) besar Nomine** atas **Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah**.

Disamping itu untuk tingkat daerah, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 mendapat penghargaan di tingkat daerah Provinsi sebagai peringkat **juara 2 (dua)** tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam **Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik**.

**Tabel 3.30**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAFTAR PENGHARGAAN / PRESTASI 2023**

NO	URAIAN KEGIATAN	NAMA PENGHARGAAAN	TINGKAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Kemudahan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Kemudahan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024	<b>NOMINE 6 NASIONAL</b>	
2.	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Penilaian OPD Terbanyak Jumlah Penerapan Inovasi	<b>PERINGKAT 2</b>	

## BAB IV PENUTUP

Memenuhi maksud Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tahun 2023 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 1 (satu) tujuan daerah yang diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.
2. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tahun 2023, juga memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang diukur oleh 3 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 serta perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

3. Untuk pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama OPD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.299.759.197,- atau sebesar 34,92% dari total anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp. 15.176.695.922,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.228.271.176,- atau sebesar 98,65%.
4. Tujuan pertama yang menjadi Indikator Kinerja Daerah “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” dengan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi menampakkan kinerja yang sangat bagus bagus karena didukung dengan pembinaan kepada UMK. Sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebesar **8%**, dapat direalisasikan dengan hasil **Memuaskan**, yang mana capaian kinerjanya hanya **483%** atau **(38,64%)** kondisi per triwulan 3 tahun 2023.
5. Tujuan kedua “**Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani**” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD” dengan hasil kinerja **Sangat Baik** dengan capaian kinerja sebesar **99,23%** dengan hasil **BB (79,64)** dari target direncanakan **A (80,25)**.
6. Kategori keberhasilan dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator, adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil **Memuaskan**, karena capaian kinerjanya **>100%**, yakni sebesar **116,16%** dan **111,06%**.
  - b. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni “Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil **Memuaskan**, karena capainnya kinerjanya **128,72%**.
  - c. 1 (satu) Indikator Kinerja OPD, yakni “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil **Sangat Baik**, karena capainnya

kinerjanya 99,23%.

#### 4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai *stakeholders*. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Merumuskan arah Investasi
2. Membuat turunan dari peraturan yang ada;
3. Melaksanakan Sosialisasi dalam hal penyelenggaraan kemudahan Perizinan Berusaha terhadap OPD dan Pelaku Usaha;
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap OPD teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perizinan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan teknis terhadap Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
6. Melakukan Pengawasan dan Inspeksi / Pengawasan Ke lapangan / perusahaan dalam hal meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
7. Menyiapkan Kebijakan Strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat;

8. Membuat Pemetaan terhadap Target Investasi
9. Melakukan Rekonsiliasi Data Potensi dan Peluang Investasi setiap periodik bersama stakeholder terkait;
10. Tetap melakukan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP;
12. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran..

Padang, Januari 2024  
Kepala DPMPTSP  
Provinsi Sumatera Barat

**ADIB ALFIKRI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197304131997031001